



JURNAL ILMU MANAJEMEN

Published every June and December
e-ISSN: 2623-2081, p-ISSN: 2089-8177

Journal homepage: http://jurnal.um-palembang.ac.id/ilmu_manajemen



Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Lembaga Pendidikan (Studi Empiris : Politeknik Pariwisata Palembang)

Eliyusma Hartuti^a, Fitriasuri^{b,*}

^aUniversitas Bina Darma, Indonesia

^bUniversitas Bina Darma, Indonesia

* Corresponding author e-mail: eliyusmaindra79@gmail.com

ARTICLE INFO

DOI:
10.32502/jimn.vXiX.XXXX

Article history:
Received:
DD MM YYYY

Accepted:
DD MM YYYY

Available online:
DD MM YYYY

ABSTRACT

This study aims to find out how human resources, internal control systems, and government accounting standards can affect the quality of financial report information in the use of budgets in educational institutions, especially at the Politeknik Pariwisata Palembang. The population of this study were all employees at the Politeknik Pariwisata Palembang, government employees and honorary employees. and 30 people were used as the research sample. This study used a purposive sampling technique. Purposive sampling is used because the data to be taken comes from sources that are deliberately selected based on the criteria or considerations that have been set by the researcher. The criteria for this research sample are government employees and honorary employees who have access to the financial reports of the Politeknik Pariwisata Palembang. Primary data was taken using a human resource questionnaire, internal control system questionnaire, government accounting standard questionnaire and financial report quality questionnaire. Data were analyzed with a linear regression analysis model. The results of the study show that there is an influence of human resources on the quality of financial reports, there is an effect of the internal control system on the quality of financial reports, and there is an effect of government accounting standards on financial reports. The results showed that all the factors that influence the quality of financial reports, especially the human resource factor, the internal control system factor and the government accounting standard factor, have a very significant influence on the quality of financial reports in

educational institutions, especially at the Politeknik Pariwisata Palembang.

Keyword:

Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dalam penggunaan anggaran pada lembaga pendidikan, khususnya di Politeknik Pariwisata Palembang. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai di Politeknik Pariwisata Palembang, baik pegawai ASN dan pegawai honorer. dan yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 30 orang. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena data yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria atau pertimbangan yang telah ditetapkan peneliti. Kriteria sampel penelitian ini adalah pegawai ASN dan honorer yang mempunyai akses terhadap laporan keuangan Politeknik Pariwisata Palembang. Data primer diambil dengan menggunakan kuisisioner sumber daya manusia, kuisisioner sistem pengendalian internal, kuisisioner standar akuntansi pemerintahan dan kuisisioner kualitas laporan keuangan. Data dianalisis dengan model analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, ada pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, dan ada pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, terutama faktor sumber daya manusia, faktor sistem pengendali internal dan faktor standar akuntansi pemerintahan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di lembaga pendidikan terutama di Politeknik Pariwisata Palembang.

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Pendahuluan

Posisi perguruan tinggi yang semula selalu berada di menara gading kini dituntut riil atas keberadaan lembaganya. Kontribusi lembaga pendidikan tinggi kepada masyarakat menjadi barang taruhan terhadap eksistensi institusi. Perguruan tinggi dinantikan kiprahnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Dunia pendidikan tinggi melalui peran institusi harus berani melakukan rekonstruksi pengelolaan

manajemen internal lembaga secara masif. Harapan ke depan, institusi pendidikan tinggi mampu mencetak sumber daya yang dapat menjawab kebutuhan rakyat. (media indonesia, 2021).

Menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, termasuk lembaga pendidikan tinggi, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah

pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial lembaga pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Salah satunya adalah pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran tahunan dalam bentuk laporan keuangan (Andriani, 2010).

Perguruan tinggi negeri sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membuat dan melaporkan penggunaan anggaran tahunan dalam laporan keuangan. Menurut Mahmudi (2011) bahwa tujuan umum dibuat laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah penyampaian laporan keuangan yang akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah (Mardiasmo, 2012).

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sumber daya manusia. Menurut Arfianti (2011) bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberi kontribusi optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sebagian kesatuan sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap pegawai merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam

pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung oleh latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memahami dan menerapkan akuntansi dengan baik.

Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia tersebut maka pembuatan laporan keuangan akan lebih efektif dan efisien. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan (Mardiasmo, 2012).

Penelitian mengenai sumber daya manusia di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Zetra tahun 2009 dalam Arfianti (2011), penelitian tersebut dilakukan di 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

Selain sumber daya manusia, hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Standar Pengendalian Internal (SPI). Menurut Peraturan pemerintah (PP) nomor 60

Tahun 2008 bahwa sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika penerapan SPI berjalan dengan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik (Sukmaningrum, 2012).

Selain sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal, dalam rangka mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik, perlu implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada laporan keuangan. Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan di atur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang disingkat SAP. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah. Menurut Ramanda (2015) penerapan SAP adalah untuk memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya, terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah. Selain itu, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Fakta dan fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia sebelum reformasi belum menggembirakan. Saat itu, akuntansi pemerintahan di Indonesia belum berperan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (Simanjuntak, 2010).

Hal ini dapat dicermati dengan melihat hasil pemeriksaan yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 577 laporan keuangan lembaga pemerintah yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011 ditemukan 4.507 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern (BPK RI, 2012). BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 2.319 kasus yang meliputi belanja fiktif, kekurangan volume belanja pekerjaan atau barang, kelebihan pembiayaan, belanja tidak sesuai ketentuan, pembayaran melebihi standar, dengan total kerugian sebanyak 1,66 triliun (BPK RI, 2012). Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan pengecualian (WDP) pada umumnya memiliki pengendalian intern telah memadai. Adapun laporan keuangan yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Masih banyaknya opini tidak wajar (TW) dan tidak menyatakan pendapat (TMP) yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah belum optimal.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata Palembang Tahun Anggaran 2019 oleh Perwakilan BPK-RI Wilayah Sumatera Selatan di Palembang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelaahan atas sistem pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan serta pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Politeknik Pariwisata Palembang, ternyata belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan minimal sebanyak 4 (empat) kelemahan. Kelemahan tersebut (BPK RI, 2019) adalah sebagai berikut;

- a. Mekanisme penganggaran tidak dilakukan secara cermat dan akurat serta belum sepenuhnya berdasarkan sifat dan jenis penerimaan dan pengeluaran.
- b. Pencatatan penggunaan persediaan tidak memadai yang mengakibatkan pengelolaan persediaan rawan penyalahgunaan.
- c. Rancangan Laporan Keuangan berupa Neraca belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai posisi keuangan lembaga sehingga belum menggambarkan struktur kekayaan yang dimiliki oleh lembaga.
- d. Tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara optimal
- e. Atas kelemahan pengendalian intern tersebut, BPK-RI menyarankan agar pihak bagian keuangan Politeknik Pariwisata Palembang melakukan review atas sistem pembukuan dan penyusunan laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada lembaga pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Politeknik Pariwisata Palembang.

Kajian Literatur

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan akuntansi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat menggambarkan kinerja entitas tersebut.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data dan sebagai informasi. Laporan keuangan pemerintah ditunjukkan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya (Mahmudi, 2011).

Menurut Mahmudi (2011) bahwa tujuan umum dibuat laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya manusia. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercayakan.

2.1.2. Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sistem Informasi Keuangan dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan yang mampu menghubungkan kantor satker ke jenjang di atasnya.
- b. Mendukung efisiensi, efektifitas dan kelancaran penyusunan laporan keuangan.
- c. Sebagai upaya mencapai peningkatan opini laporan keuangan.

Menurut Nugroho Widjajanto (2014 : 24) dalam Kumalase dkk (2014 : 117) mendefinisikan kualitas informasi sebagai berikut : Kualitas informasi dikatakan berkualitas bila informasi tersebut mengandung ketidakpastian paling rendah, akan tetapi informasi tidak dapat terbebas sama sekali dari unsur ketidakpastian. Oleh karena itu diperlukan perbandingan antara data memperoleh informasi dengan manfaat

yang diperoleh dengan adanya informasi itu sendiri.

Dengan kata lain informasi baru layak disiapkan jika, biayanya lebih rendah daripada tambahan pendapatan nyata yang dihasilkan dari adanya informasi itu. Untuk menopang terbentuknya kualitas informasi yang baik ada beberapa atribut yang perlu diperhitungkan menurut Nugroho Widjajanto (2004 : 24) Kumalase dkk (2014 : 117) yaitu : Kecermatan (Accuracy), kecermatan dapat didefenisikan sebagai perbandingan antara informasi yang benar terhadap total informasi yang dihasilkan dalam suatu periode. Semakin kritis sifat informasi akan semakin tinggi kecermatan yang diperlukan. Penyajian yang tepat waktu (timeliness) informasi yang lambat diterima nilai kegunaannya akan lebih rendah, karena keputusan bisnis yang cepat dianggap lebih baik daripada keputusan yang lambat.

2.1.3. Kriteria Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Untuk mendapatkan informasi akuntansi berupa laporan keuangan, diperlukan standar atau kriteria yang menjadi acuan pokok dalam membuat laporan keuangan yang dinilai berkualitas. Di Indonesia standar laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan adalah himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan, seperti kreditor.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, tujuan akuntansi dan laporan keuangan pada dasarnya untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan ekonomi. Kriteria dan unsur-unsur kualitas atau nilai informasi dari laporan keuangan pemerintah telah ditentukan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, ada empat

macam karakteristik kualitas informasi keuangan yaitu : relevan, dapat diuji, dapat dimengerti, netral, tepat waktu, lengkap, relevan, dapat diandalkan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menurut Matindas (2012 : 89) dalam Kurniawan (2016 : 19) adalah kesatuan tenaga manusia yang ada dalam suatu organisasi dan bukan sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagian kesatuan sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Berbicara tentang sumber daya manusia, hidup, arti, dan peranan keberadaannya selalu aktual. Sebab sampai sekarang ini manusia tetap menjadi sentral pembahasan dalam berbagai masalah. Peristiwa macam apapun yang ada di dunia ini dan masalah apapun yang harus dipecahkan di bumi kita ini pada hakikatnya berhubungan dengan manusia. Misalnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat mempermudah hidup manusia dan sekaligus mempermudah hidup manusia.

Menurut Winidyaningrum (2009) bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung oleh latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memahami dan menerapkan akuntansi dengan baik. Kapasitas sumberdaya manusia harus dilihat dari kemampuan untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, maka dari itu

harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Sukmaningrum 2012).

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah, pemerintah harus memiliki sumber daya yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Kompetensi merupakan karakteristik dari seseorang yang memiliki ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan pekerjaan (Harvesi 2005). Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan pengalaman dibidang keuangan. Menurut Hutapea (2008) bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, kemampuan, dan perilaku individu atau sikap yang dimiliki oleh masing-masing individu. Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pegawai turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

2.2.2. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mahmudi (2011) sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dan mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Adapun tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern, yaitu : untuk melindungi asset (termasuk data) Negara, untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat, untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal, untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, untuk efisiensi dan efektivitas operasi

Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu. Menurut Mahmudi (dalam Madjham, dkk, 2013) menyebutkan komponen sistem pengendalian internal pemerintah, terdiri atas lima komponen, yaitu : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, dan Pemantauan. Menurut Sukmaningrum (2012) bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan pengendalian kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

2.2.3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Mardiasmo (2012) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Setiap entitas pelaporan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari :

- a. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah
- b. PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan
- c. PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran
- d. PSAP Nomor 03 Tentang Laporan Arus Kas

Dengan adanya SAP, maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan). Laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain pemerintah, DPR/DPRD, investor, kreditor dan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Sesuai undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pada BAB VII mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Pada pasal 32 menyatakan bentuk dan Isi

laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang disingkat SAP. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah. Standar akuntansi pemerintahan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 memuat dua belas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi pemerintah, yaitu : 1). PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan, 2). PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran. 3). PSAP No. 03 Laporan Arus Kas, 4). PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan. 5). PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan. 6). PSAP No 06 Akuntansi Investasi. 7). PSAP No 07 Akuntansi Aset Tetap. 8). PSAP No 08 Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan. 9). PSAP No 09 Akuntansi Kewajiban. 10). PSAP No 10 Koreksi Kesalahan. 11). PSAP No 11 Laporan Keuangan Konsolidasi. 12). PSAP No 12 Laporan Operasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan analisa regresi berganda, yang dirancang untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu sumber daya manusia, sitem pengendalian internal, dan

standar akuntansi pemerintah terhadap variabel terikat, yaitu kualitas laporan keuangan, baik pengaruh masing-masing maupun pengaruh bersama-sama. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan model pengumpulan data dengan kuisisioner dan data dianalisis dengan program SPSS-20 untuk menguji hipotesis.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai di Politeknik Pariwisata Palembang, baik pegawai ASN dan pegawai honorer. Berdasarkan data dari bagian kepegawaian bahwa jumlah pegawai di Politeknik Pariwisata Palembang berjumlah 85 orang. Menurut Riduwan (2012) Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). *Purposive sampling* digunakan karena data yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria atau pertimbangan yang telah ditetapkan peneliti. Kriteria sampel penelitian ini adalah pegawai ASN dan honorer yang mempunyai akses terhadap laporan keuangan Politeknik Pariwisata Palembang, utamanya adalah pegawai bidang administrasi dan umum (bagian keuangan) yang berjumlah 30 orang pegawai.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode Angket (Kuesioner). Merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang mereka ketahui (Suharsimi, 2006:151).

Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan. Dengan memberikan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden secara langsung di lokasi penelitian. Daftar pertanyaan tersebut berkaitan dengan variabel penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisisioner. Ada empat kuisisioner yang digunakan, yaitu : 1). Kuisisioner tentang variabel sumber daya manusia, 2). Kuisisioner tentang variabel sistem pengendalian internal. 3). Kuisisioner tentang variabel standar akuntansi pemerintahan. 4). Kuisisioner tentang variabel kualitas laporan keuangan.

Teknik analisis data adalah pengolahan data hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan setelah data penelitian terkumpul. Penelitian ini akan diuji menggunakan metode regresi linear untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Model regresi harus memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang baik. Apabila dalam suatu model telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik. Model regresi perlu diuji dengan asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil Hipotesis dan Pembahasan

Ada empat hipotesis dalam penelitian, yaitu : 1). Terdapat pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Politeknik Pariwisata Palembang. 2). Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di Politeknik Pariwisata Palembang. 3). Terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di Politeknik Pariwisata Palembang. 4). Terdapat pengaruh secara bersama-sama

sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di Politeknik Pariwisata Palembang.

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, dilakukan dengan menguji koefisien jalur masing-masing variabel. Koefisien jalur menunjukkan pengaruh langsung dari setiap variabel (Gaspers dalam Cahyasumirat, 2006). Uji keempat hipotesis pada penelitian ini dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Uji regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Syarat untuk uji regresi linier berganda adalah data harus valid, reliabel, normal dan linier. Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana, apabila nilai signifikansi < 0,05 artinya variabel bebas

(variabel X) berpengaruh terhadap variabel terikat (variabel Y). Sebaliknya apabila nilai signifikansi > 0,05 artinya variabel bebas (variabel X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Statistik.com, 2020). Selain uji regresi linier berganda, dapat dilihat hasil uji F. Tujuan dari uji F adalah untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh bersama-sama dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika F hitung > F tabel, maka ada pengaruh variabel X1 dan variabel X2 secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (spssstatistik.com, 2020).

Hasil pengujian berdasarkan oleh data dengan SPSS-20 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Hasil Uji Hipotesis Masing-masing Variabel Bebas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,088	11,761		1,186	,238
SDM (X1)	,416	,107	,370	3,893	,000
SPI (X2)	,371	,206	1,225	12,897	,000
SAP (X3)	,516	,208	,739	13,893	,000

a. Dependent Variable: Kualitas_Laporan_Keuangan

Sumber: hasil analisis, 2023

Tabel 2 : Hasil Uji Hipotesis 4

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4177,288	2	1588,694	27,400	.000 ^b
Residual	1113,520	127	8,554		
Total	5390,908	129			

a. Dependent Variable: Kualitas_Laporan_Keuangan

b. Predictors: (Constant), SDM, SPI, SAP

Sumber: hasil analisis, 2023

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa nilai sig. t untuk keempat variabel bebas

sebesar 0,000 ($p < 0.05$), hal tersebut berarti ada pengaruh signifikan. Variabel sumber

daya manusia, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini dapat diterima.

Berdasarkan analisis data pada tabel 2 diatas bahwa nilai *sig. F* sebesar 0.000 ($p < 0.05$), berarti ada pengaruh signifikan variabel sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan terhadap terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima. Ini berarti bahwa ada

pengaruh secara bersama-sama sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di Politeknik Pariwisata Palembang. Berdasarkan analisis data uji hipotesis 4 diketahui bahwa nilai *F* hitung sebesar 27,400, maka $F \text{ tabel} = (k : n - k) = 3 : 30 - 3 = 2,92$ dengan demikian $F \text{ hitung} > F \text{ tabel} (27,400 > 2,92)$ maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 3 : Koefisien Diterminasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.900 ^a	.750	.707	3,091

Sumber: hasil analisis, 2023

Berdasarkan output SPSS-20 hasil uji hipotesis 4 pada tabel 3 di atas diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,750. Hal tersebut menggambarkan bahwa sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan sebesar 75%, sedangkan sisanya sebesar 25% kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor lain diluar faktor sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan.

Simpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian untuk hipotesis 1 terbukti bahwa faktor sumber daya manusia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara keseluruhan dari hasil penyebaran kuisioner menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan setuju terhadap variabel sumber daya manusia, ini berarti sumber daya manusia di Politeknik Pariwisata Palembang kategori baik. Sedangkan hasil penelitian untuk hipotesis 2 terbukti bahwa faktor sistem pengendalian internal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara keseluruhan dari hasil penyebaran kuisioner menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan cukup setuju.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di Politeknik Pariwisata Palembang dalam kategori cukup baik, sehingga hal tersebut perlu ada peningkatan. Untuk hasil kesimpulan hipotesis ketiga untuk penelitian ini membuktikan bahwa faktor standar akuntansi pemerintahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara keseluruhan dari hasil penyebaran kuisioner menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan cukup setuju. Untuk variabel standar akuntansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan di Politeknik Pariwisata Palembang dalam kategori cukup baik, sehingga hal tersebut perlu ada peningkatan kedepannya.

Sedangkan kesimpulan keempat berdasarkan hasil hipotesis 4 terbukti bahwa ada pengaruh secara bersama-sama sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di Politeknik Pariwisata Palembang (dengan nilai R Square sebesar 0,750). Hal tersebut menggambarkan bahwa sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 75%, sedangkan sisanya sebesar 25% kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor lain diluar faktor sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan. Sehingga kedepannya perlu ada penelitian lanjutan terkait faktor lain tersebut.

Daftar Pustaka

- Andriani, Wiwik. (2010). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol. 5 No. 1 Juni 2010.
- Arfianti Dita. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Batang), Skripsi, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Armando, Gerry. (2012). Pengaruh Sistem Pendendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi), Skripsi, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2012). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011. Jakarta. Diakses pada 12 Maret 2012 dari www.bpk.go.id
- Erlina. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Salemba.
- Haza, Irfan Ikhwanu. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang). *Artikel*. Hal 1-19.
- Hutapea, T. (2008). *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntantansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *KSAP*. (2012). Standar Akuntansi Pemerintahan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Jakarta : Salemba Empat.
- Kumalase, Diyan, dkk. (2014). Analisis Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Pada PT.PLN (Persero) Wilayah Jawa Tengah. *Jurnal*. Hal. 1-15.
- Kurniawan, Anugrah. (2016). Evaluasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. Skripsi Makassar : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Madjam, Anggraeni S, dkk. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Pada Dppkad Kabupaten Gorontalo Utara). *Jurnal*. Hal. 1-12.

- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, dkk. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Cetakan Kelima. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Cet. IV. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2012). *Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia* Vol. 6 No.1, Juni 2002.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Cetakan Kesatu. Bandung. PT Refika Aditama.
- Simanjuntak, Binsar. (2010). *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Sektor Pemerintahan di Indonesia*, disampaikan pada Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia pada 9 Desember 2010, Jakarta.
- Tenardi, Wendri, dkk. (2009). *Sistem Informasi Keuangan Pada Sekolah ST.Agatha*.*Jurnal*. Hal 1-9
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wijaya, T. 2012. *Cepat Menguasai SPSS-20 untuk Olah Data dan Interpretasi Data*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati. 2009. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN)*. *Simposium Nasional Akuntansi XIII tahun 2010, ASP, Purwokerto*.
- Yudianta, Agus, Gede. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Jurnal*. Hal 1-13